

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan tambak di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan dalam Hukum Islam. Dalam praktiknya ditemukan beberapa permasalahan, seperti pengambilan hasil tambak oleh pemilik lahan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pengelola, serta keterlambatan dalam penyediaan kebutuhan tambak. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, terutama terkait akad muzāra‘ah dan nilai-nilai keadilan, amanah, serta kejelasan kesepakatan dalam muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Data yang diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dengan berbagai narasumber yang terlibat (Pemilik lahan, Pengelola tambak, Kepala Desa, Warga sekitar). Selain itu digunakan juga sumber sekunder, data yang dapat diperoleh dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber dari buku, jurnal, dan dokumen tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang terjadi antara pemilik lahan dan pengelola tambak masih banyak dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembagian hasil dan rentan menimbulkan konflik. Dalam praktiknya, pembagian hasil umumnya dilakukan secara proporsional (50:50) dan bersifat turun-temurun, yang dapat dikategorikan sebagai *‘urf ‘amali*. Namun ditemukan pula praktik *‘urf fāsid*, seperti pengambilan hasil panen secara sepihak oleh pemilik tambak tanpa persetujuan pengelola, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman dan penerapan akad syariah yang sesuai serta perlunya dokumentasi tertulis untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kerja sama pertambakan.

Kata Kunci: Pengelolaan Tambak, Muzāra‘ah, ‘Urf, Hukum Islam

ABSTRACT

This research examines the management of ponds in Kepel Village, Bugul Kidul Subdistrict, Pasuruan City in Islamic law. This research aims to find out in depth how the practice of cooperation that occurs between landowners and pond managers in milkfish farming activities. In addition, this study also aims to analyze the suitability of these practices with the principles of Islamic law, especially within the framework of the Muzāra'ah contract and the values of justice, trust, and agreement in muamalah.

This research uses descriptive qualitative methods with a field approach. Data obtained from primary sources in the form of interviews with various resource persons involved (landowners, pond managers, village heads, local residents). In addition, secondary sources are also used, data that can be obtained from literature and legal material documents. In this case researchers use sources from books, journals, and other written documents. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out, which includes data reduction, presentation and conclusion stages.

The results show that the cooperation between landowners and pond managers is still mostly done orally without written documentation, which results in uncertainty in the division of results and is prone to conflict. In practice, profit sharing is generally done proportionally (50:50) and is hereditary, which can be categorized as 'urf 'amali. However, there are also 'urf fāsid practices, such as unilateral harvesting by the pond owner without the consent of the manager, which contradicts the principles of justice and trust in Islam. Therefore, it is important to understand and apply appropriate sharia contracts and the need for written documentation to ensure justice and legal certainty in aquaculture cooperation.

Keywords: Farm Management, Muzāra'ah, 'Urf, Islamic Law